

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH PADA PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2013-2015**

**IKHTIAR ADI LUHUNG  
8335132474**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan/ Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
KONSENTRASI AUDIT  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

***THE INFLUENCE OF BALANCE FUNDS AND LOCALLY-GENERATED REVENUE TO FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT ON WEST JAVA PROVINCES YEARS 2013-2015***

**IKHTIAR ADI LUHUNG  
8335132474**



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment**

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING  
CONCENTRATION OF AUDITING  
FAKULTY OF ECONOMIS  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

**Ikhtiar Adi Luhung**, 2017: Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015. Universitas Negeri Jakarta.

Pembimbing: (1) M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM (2) Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015. Variabel dependen berupa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diukur menggunakan Rasio Aktivitas. Sementara itu, untuk variabel independen berupa Dana Perimbangan diukur dengan Ln Total Realisasi Pana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah diukur dengan Ln Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan populasi seluruh laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Purposive sampling* digunakan yaitu laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ada selama tahun 2013-2015 yang terdapat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 Kabupaten dan 7 Kota. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS 24.

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015, Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015. Serta Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan / bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015

**Kata kunci:** Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## ABSTRACT

**Ikhtiar Adi Luhung**, 2017 *The Influence Of Balance Funds And Locally-Generated Revenue To Financial Performance Of Local Government On West Java Provinces Years 2013-2015*. Universitas Negeri Jakarta.

*Supervisor:* (1) M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM (2) Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak.

*This research aimed to examine the effect of Balance Funds And Locally-Generated Revenue To Financial Performance Of Local Government On West Java Provinces Years 2013-2015. Dependent variable, Financial Performance Of Local Government, is measured using activity ratio. Meanwhile, for the independent variables such as Balance Funds is measured using Ln Balance Funds and Locally-Generated Revenue is measured using Ln Locally-Generated Revenue. The data used is secondary data with the population is financial report all of West Java. With Purposive sampling method, financial report all of West Java on years 2013-2015 which are contained in Directorate General of Fiscal Balance, so the samples used 12 district and 7 city. This research uses multiple regression method to test the hypothesis with the help of SPSS 24.*

*From the analysis performed in this research, it can be conclude that the Balance Fund as partial have negative and significant effect on Financial Performance Of Local Government On West Java Provinces Years 2013-2015, Locally-Generated Revenue as partial have positive and significant effect on Financial Performance Of Local Government On West Java Provinces Years 2013-2015. And Balance Fund with Locally-Generated Revenue as together have positive and significant effect on Financial Performance Of Local Government On West Java Provinces Years 2013-2015.*

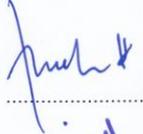
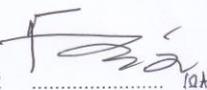
**Keywords:** *Balance Funds, Locally-Generated Revenue, and Financial Performance Of Local Government.*

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus  
NIP. 196712071992031001

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Tanggal</u>
<u>Dr. IGKA Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA.</u> NIP. 196612131993032003	Ketua Penguji		19 Agustus 2017
<u>Diah Armeliza, SE, M.Ak.</u> NIP. 197904292005012001	Sekretaris		19 Agustus 2017
<u>Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak.</u> NIP. 197706172008122001	Penguji Ahli		19 Agustus 2017
<u>M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM</u> NIP. 197104132001121001	Pembimbing 1		19 Agustus 2017
<u>Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak.</u> NIP. 197705172010122004	Pembimbing 2		19 Agustus 2017

Tanggal Lulus : 4 Agustus 2017

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



Ikhtiar Adi Luhung

NIM. 8335132474

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan rencana. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan segala ketulusan hati praktikan ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua beserta seluruh keluarga penulis karena telah memberikan semangat yang begitu besar untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
2. M. Yasser Arafat, SE,Akt,MM. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan masukan serta dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Dr. IGKA Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmunya, baik kepada penulis maupun mahasiswa lainnya.
6. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler 2013 yang telah banyak memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang sekiranya dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis sendiri dan para pembaca secara umumnya.

Jakarta, Maret 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIK</b>	
A. Deskripsi Konseptual .....	13
1. Teori Stewardship .....	13
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
3. Dana Perimbangan .....	25
4. Pendapatan Asli Daerah .....	32

B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	36
C. Kerangka Teoritik.....	44
D. Perumusan Hipotesis Penelitian .....	48

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian .....	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian atau Objek dan Ruang Lingkup Penelitian .....	50
C. Metode Penelitian.....	51
D. Populasi dan Sampling atau Jenis dan Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data atau Operasionalisasi Variabel.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	55

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data .....	61
B. Pengujian Hipotesis .....	65
C. Pembahasan .....	80

### **BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kesimpulan .....	85
B. Implikasi .....	86
C. Saran .....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Populasi nama Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat ....	92
Lampiran 2: Daftar sampel nama Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat .....	94
Lampiran 3: Data Ln Total Realisasi Dana Perimbangan tahun 2013-2015 .....	95
Lampiran 4: Data Ln Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2015 .....	96
Lampiran 5: Data Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2015 .....	97
Lampiran 6 : Data Realisasi Dana Perimbangan tahun 2013-2015 (dalam jutaan Rupiah).....	98
Lampiran 7 : Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2015 (dalam jutaan Rupiah) .....	99
Lampiran 8 : Data Realisasi Belanja Operasi tahun 2013-2015 (dalam jutaan Rupiah).....	100
Lampiran 9 : Data Realisasi Total APBD tahun 2013-2015 (dalam jutaan Rupiah) .....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Hasil Penelitian yang Relevan .....	41
Tabel 4.1: Jumlah Sampel Penelitian .....	61
Tabel 4.2: Uji Statistik Deskriptif .....	62
Tabel 4.3: Uji Kolmogorov-Smirnov .....	68
Tabel 4.4: Uji Multikolinearitas .....	69
Tabel 4.5: Uji Auto Korelasi .....	71
Tabel 4.6: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	72
Tabel 4.7: Uji-t .....	74
Tabel 4.8: Uji-F .....	77
Tabel 4.9: Koefisien Determinasi .....	78
Tabel 4.10: Koefisien Korelasi .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Komposisi Pendapatan Daerah .....	8
Gambar 2.1: Contoh Format APBD.....	25
Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 4.1: Uji Histogram.....	66
Gambar 4.2: Uji <i>Probability Plot</i> .....	67
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi, yang mana tiap-tiap provinsi tersebut terdiri dari kabupaten dan kota. Dari tiap-tiap provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota tersebut, memiliki pemerintahan daerah untuk mengatur dan melaksanakan sendiri pemerintahan sesuai dengan program otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangan yang juga diserahkan kewenangannya ke pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126). Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus atau defisit menunjukkan sebuah muara dari komitmen atau kesepakatan antara eksekutif (Kepala Daerah dan jajarannya) dengan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam satu tahun anggaran, yang di hulunya sendiri sudah dihiasi dengan berbagai asumsi dan kompensasi.

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Jika anggaran/realisasi pendapatan lebih besar daripada anggaran/realisasi belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Ada pemerintah daerah yang mengalami surplus dalam anggaran ataupun realisasi anggarannya, namun lebih banyak lagi Pemda yang mengalami defisit.

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2004:215) untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja, dan standar biaya. Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2004:215).

Ringkasan kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan harus dilaporkan oleh kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang terdapat di nota perhitungan APBD dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD kepada pemerintah pusat dengan tembusan kepada DPRD. Nota perhitungan APBD mencakup kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berjalan, kinerja pelayanan yang dicapai, bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal atau pembangunan untuk aparatur daerah dan pelayanan publik, bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD, posisi dana cadangan, laporan aliran kas, neraca daerah (Fuadi, 2016:106).

APBD merupakan unsur yang sangat penting dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, karena rasio-rasio dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan unsur-unsur yang ada dalam APBD seperti rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi yang menggunakan unsur Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah yang menggunakan unsur pendapatan yaitu akun pendapatan transfer atau (Dana Perimbangan) atau rasio aktivitas yang menggunakan unsur belanja yaitu akun belanja rutin dan belanja pembangunan.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi besar dengan jumlah penduduk yang terbilang tinggi yang secara tidak langsung menuntut pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Namun pada tahun 2013 dan 2014, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan sejumlah masalah yang cukup signifikan dan cenderung berulang pada Laporan Keuangan provinsi Jawa Barat. Beberapa masalah tersebut antara lain, penatausahaan aset tetap yang belum tertib diantaranya tanah pemerintah daerah Jawa Barat masih banyak yang belum bersertifikat dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadaannya, pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran riil, penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dana kapitasi tersebut, keberadaan BUMD (non PDAM) yang didirikan oleh pemerintah daerah masih banyak yang belum memberikan

kontribusi kepada pemerintah daerah. Dengan masih banyaknya masalah keuangan pada Provinsi Jawa Barat juga akan mempengaruhi kinerja keuangan provinsi tersebut. (<http://bandung.bisnis.com/read/20150605/82444/535082/ini-6-masalah-yang-masih-membelit-laporan-keuangandaerah-di-jabar>)

Selain masih terdapat sejumlah masalah tersebut, pada tahun 2015 berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa terjadi keterlambatan penyerapan anggaran baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi Jawa Barat, hal ini disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan saat melakukan pertemuan dengan Tim Komisi XI DPR. (<http://news.liputan6.com/read/2876819/penyerapan-anggaran-jawa-barat-lambat>). Dengan masalah keterlambatan penyerapan baik di daerah Provinsi Jawa Barat ataupun daerah Provinsi lainnya, tentu akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dan diukur dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya dan salah satu pengukuran kinerja pemerintah daerah yaitu dalam hal keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum, masih menjadi masalah serius. Persoalan tersebut dinilai mendesak harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah lainnya (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/04/nnu386-bpk-pengelolaan-keuangan-daerah-masih-jadi-masalah>).

APBD dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD era prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak pemerintah daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Di dalam bentuk APBD tersebut, pendapatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

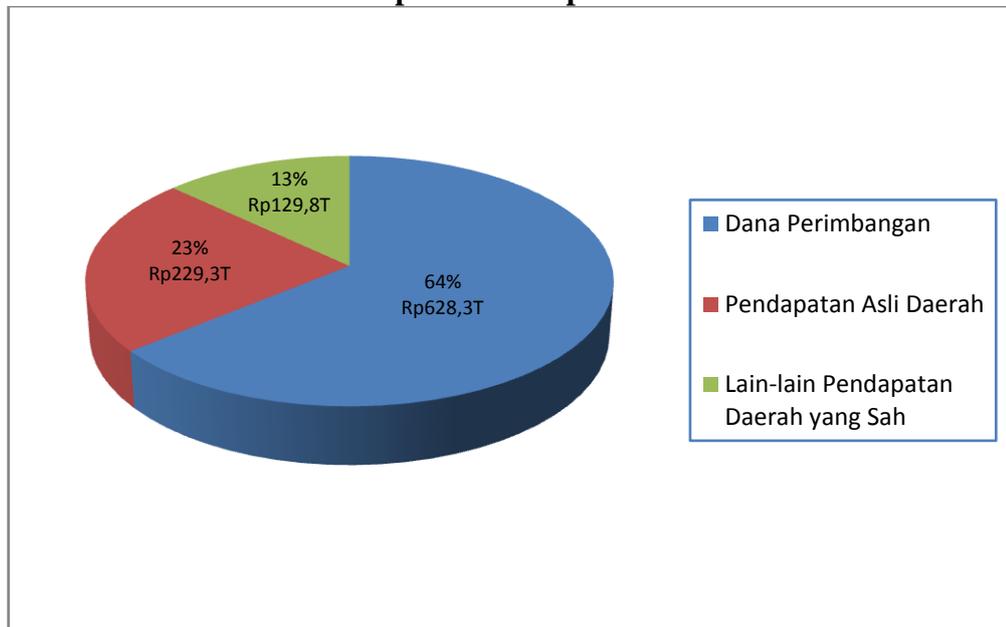
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa PAD relatif kecil sehingga APBD pada umumnya didominasi oleh sumbangan dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan). Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah akan sangat bergantung kepada pemerintah pusat dalam sumber pendapatan daerahnya yaitu dari Dana Perimbangan. Jika pemerintah pusat mengurangi jumlah Dana Perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah akan berkurang dan pemerintah daerah harus mencari dan menggali lebih banyak lagi pendapatan daerah dari sektor lain, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rendahnya PAD bukan berarti bahwa daerah tersebut miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat. Aturan keuangan pusat dan daerah, pada satu sisi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, disisi lain untuk memfasilitasi proses pembangunan daerah yang dijalankan dibawah skema otonomi daerah (Adisasmita, 2011:156).

Akan tetapi dengan rendahnya PAD, juga akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dengan rendahnya PAD akan menurunkan penerimaan pendapatan daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci dapat dinilai dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari Laporan Keuangan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas (Mahmudi, 2010:87). Dengan menurunnya penerimaan pendapatan daerah maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam Laporan Realisasi Anggaran selain unsur belanja dan juga pembiayaan. Dengan menurunnya pendapatan daerah karena masih rendahnya penerimaan PAD juga akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Masih kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga masih mendominasinya sumbangan dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan) dapat dilihat pada Gambaran Umum APBD 2016 berikut ini.

**Gambar 1.1**  
**Komposisi Pendapatan Daerah**



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa dana sumbangan dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan) masih jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komposisi Pendapatan Daerah pada gambaran umum APBD tahun 2016 besaran jumlah uang dan presentase, terlihat bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 64% atau senilai Rp628,3 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 23% atau senilai Rp229,3 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 13% atau senilai Rp129,8 triliun.

Berdasarkan semua penjelasan tersebut, penelitian ini mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya pengaruh pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini akan memiliki

kontribusi dan bermanfaat untuk perkembangan informasi yang relevan bagi ilmu Akuntansi Keuangan Daerah, karena penelitian ini memiliki perkembangan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama terkait sumber data dari penelitian ini, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang baru dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan pada tahun 2016, sehingga penelitian ini akan menjadi lebih terbaru dan juga perbedaan sampel maupun populasi. Peneliti bermaksud untuk menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2015”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam judul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” yaitu sebagai berikut:

1. Masih terdapat sejumlah masalah pada laporan keuangan provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 dan 2014, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
2. Pada tahun anggaran 2015 terjadi keterlambatan penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Tata kelola keuangan pemerintah daerah masih sering menimbulkan pelanggaran hukum, sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah tersebut.
4. Ketergantungan pemerintah daerah akan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih besar, sehingga daerah tersebut akan kurang mandiri dalam menghasilkan pendapatan daerahnya.
5. Pendapatan asli daerah masih relatif kecil dalam menyumbang pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah akan bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Penelitian ini terfokus pada Dana Perimbangan yang cara mengambil datanya dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah yang datanya diambil juga dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan Rasio Aktivitas yang datanya juga diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu bagian Belanja dan Total APBD.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Barat ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Barat ?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 -2015. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel, baik variabel dependen dan variabel independen secara nyata dari konsep-konsep yang ada, sehingga mampu mendukung untuk melakukan pengembangan penelitian mengenai pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran dan bahan pertimbangan kepada

pemerintah daerah untuk dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan dibidang keuangan daerah, khususnya pemerintah daerah provinsi Jawa Barat.

- b. Bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan manfaat yang terkandung didalam penelitian, yaitu bahan pengetahuan mengenai Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang relevan dikemudian hari.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Deskripsi Konseptual**

##### **1. Teori Stewardship**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship* karena penelitian ini berhubungan dengan akuntansi sektor publik. Apabila dalam teori *agency* menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*, maka dalam teori *stewardship* menurut Donaldson dan Davis (1991) dalam Nosihana dan Yaya (2016) teori ini menjelaskan hubungan antara *principals* dan *stewards*. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Dimana rakyat sebagai *principals* dan pemerintah sebagai *stewards*, adalah sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya.

Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat.

## **2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 6, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Adisasmita, 2011:29).

Keuangan daerah juga dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995 dalam Halim, 2012:19).

Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan meurunkan kekayaan daerah (Halim, 2012:20)

Dalam pembahasan mengenai kinerja keuangan daerah, lebih banyak diarahkan pada kinerja dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, sehingga dalam pembahasannya banyak memaparkan mengenai keuangan daerah, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari kata "*performance*" yang berarti "penampilan" atau "prestasi". Menurut James B. Whittaker, sebagaimana dikutip oleh LAN RI dan BPKP (2000:5) dalam Adisasmita (2011:30), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goal and objective*).

Menurut Vincent Gasperz (1998:267) dalam Adisasmita (2011:31), *performance* adalah pemberian pelayanan yang produktif, efektif, dan efisien serta berkualitas berupa pengendalian terus menerus dari manajemen pemerintah sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan menurut Amin Wijaya (1995:48) dalam Adisasmita (2011:31), kinerja adalah prestasi pegawai dan penembangan profesi di masa datang dilakukan dengan sistematis dan formal. Menurut Mustopadidjaya AR (1993:3) dalam Adisasmita (2011:31), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Dari beberapa penjelasan mengenai kinerja dan keuangan daerah tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian atau prestasi dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah yang meliputi semua hak dan kewajiban yang berupa pendapatan dan belanja daerah agar tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kebebasan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan.

## 2.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, yaitu: indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*), indikator manfaat (*benefit*), dan indikator dampak (*impact*). Berikut ini hanya akan diuraikan tentang indikator masukan, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak (Adisasmita, 2011:35).

- 1) Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundangan dan sebagainya.
- 2) Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator ini biasanya membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
- 3) Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek langsung).
- 4) Indikator manfaat adalah sesuatu kegunaan yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 5) Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan masing-masing indikator di atas digunakan rumus efektivitas, yaitu membandingkan antara realisasi (yang berhasil dicapai) dengan target (yang direncanakan), dihitung dalam presentase (%). Jika hasilnya lebih besar dari 100, berarti tingkat keberhasilannya tinggi, karena realisasinya melampaui target yang ditetapkan, sebaliknya jika hasilnya lebih kecil dari 100, artinya tingkat keberhasilannya rendah karena target yang telah ditetapkan ternyata tidak tercapai.

## **2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan secara lebih rinci dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan dapat tercermin dari Laporan Keuangan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mahmudi, 2010:87).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Hasil analisis rasio keuangan tersebut selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam (Halim, 2012:126):

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2012:128) dan Mahmudi (2010:142) berikut beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak daerah dan juga retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat berupa transfer dana perimbangan ataupun dari pinjaman.

Rasio Kemandirian =

$$\left( \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \right)$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin

tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \left( \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \right)$$

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah =

$$\left( \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \right)$$

d. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas =

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \right)$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu jauh lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Rasio Efisiensi =

$$\left( \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \right)$$

e. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio aktivitas itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rasio Aktivitas =

$$\left( \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \right) \quad \left( \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \right)$$

f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan yang dimaksud disini adalah pertumbuhan pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan dalam suatu periode.

Dari beberapa rasio tersebut, peneliti memilih menggunakan rasio aktivitas karena pada referensi penelitian terdahulu penulis, belum ada yang menggunakan rasio aktivitas, sehingga penulis memilih menggunakan rasio aktivitas untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Gambar 2.1 Contoh Format APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2017**

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT <b>SEKRETARIAT DAERAH</b> Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448; 4233347; 4230963 Faximile : (022) 4203450. Website : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id <b>B A N D U N G 40115</b>	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>16.524.120.917.766,00</b>
Pajak Daerah	15.238.472.081.401,00
Retribusi Daerah	58.245.147.484,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	323.443.062.831,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	903.960.626.050,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>13.987.089.323.786,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.723.660.213.174,00
Dana Alokasi Umum	2.992.041.500.612,00
Dana Alokasi Khusus	9.271.387.610.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>29.690.800.000,00</b>
Pendapatan Hibah	22.190.800.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>30.540.901.041.552,00</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>32.429.026.041.552,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(1.888.125.000.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	2.200.000.000.000,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.200.000.000.000,00</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	311.875.000.000,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>311.875.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.888.125.000.000,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>
<b>VOLUME APBD</b>	<b>32.740.901.041.552,00</b>

**Sumber: Situs web resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat**

### 3. Dana Perimbangan

#### 3.1 Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Nurcholis (2007:185), dana perimbangan tersebut merupakan hasil kebijakan pusat di bidang desentralisasi fiskal (penyerahan hasil-hasil pajak dan pungutan lainnya kepada daerah) demi keseimbangan fiskal (*fiscal balance*) antara pusat dan daerah.

Sedangkan menurut Bratakusumah dan Solihin (2004:174), dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dana Perimbangan terdapat di APBD yg merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Daerah seperti terlihat pada Gambar 2.1 halaman 25. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **3.2 Dana Bagi Hasil**

Menurut Rachim (2015:48), dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil menurut Colfer, Dahal, dan Capistrano (2009:176), dimaksudkan untuk menjawab tuntutan daerah, merangsang partisipasi daerah dalam menggerakkan penghasilan nasional dan mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak, cukai, sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dana bagi hasil yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
2. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

3. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
5. Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

### **3.3 Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2004:183), dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana alokasi umum yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota (Suparmoko, 2002:43).

Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Proporsi dana alokasi umum antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Celah fiskal sebagaimana dimaksud merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan.

Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dana alokasi umum dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Kebijakan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud, dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam menetapkan kebijakan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud, pemerintah pusat mempertimbangkan daerah yang berciri kepulauan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan alokasi dana alokasi umum untuk setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan.

### **3.4 Dana Alokasi Khusus**

Dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014 adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Suparmoko 2002:43)

Menurut Sugianto (2007:26), dana alokasi khusus digunakan untuk membantu pendanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana alokasi khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan dana alokasi khusus dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja pemerintah pusat. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus dengan menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai dana alokasi khusus.

Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pusat menjadi dasar pengalokasian dana alokasi khusus. Alokasi dari dana alokasi khusus per daerah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

### **3.5 Perhitungan Dana Perimbangan**

Dalam penelitian ini Dana Perimbangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Andirfa, Majid, dkk. 2016:33):

$$\left[ \text{Dana Perimbangan} = \text{Ln Total Realisasi Dana Perimbangan} \right]$$

## **4. Pendapatan Asli Daerah**

### **4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan keuangan diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD juga terdapat di APBD pada bagian Pendapatan Daerah seperti terlihat pada Gambar 2.1 halaman 25

Menurut Mardiasmo (2007:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Lalu menurut Nurcholis (2007:182) Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

PAD hanyalah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah di samping penerimaan lainnya berupa dana

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

#### **4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

##### **1) Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak

Daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (4) Pajak Air Permukaan
- (5) Pajak Rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Air Tanah
- (9) Pajak Sarang Burung Walet
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah timbul akibat adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah pemungut retribusi. Diharapkan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

## 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hal tersebut dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan, vila, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

## 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b) Jasa giro,
- c) Pendapatan bunga,
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

### 4.3 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Andirfa, Majid, dkk. 2016:33) :

$$\left[ \text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Ln Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah} \right]$$

#### B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dan atau perbedaan tertentu terhadap penelitian yang akan dilakukan, objek yang diteliti, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, jumlah dan jenis sampel yang digunakan dan juga temuan yang telah dan akan dihasilkan. Hasil penelitian yang relevan ini bersumber dari jurnal penelitian yang telah dipublikasikan.

Andirfa, Majid, dkk (2016) meneliti tentang pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Berbeda dengan Andirfa dkk, penelitian ini tidak menggunakan belanja modal karena peneliti hanya ingin meneliti bagian pendapatan daerah, sedangkan belanja modal

masuk dalam bagian belanja daerah, akan tetapi peneliti menggunakan proksi atau perhitungan yang sama dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan Log Natural (Ln).

Budianto dan Alexander (2016) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Dearah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemrintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai acuan utama karena sama-sama menggunakan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen, akan tetapi memiliki perbedaaan dengan penelitian ini yaitu dalam hal proksi dan objek penelitian. Dalam penelitian ini Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan peneliti menggunakan Rasio Aktivitas, dalam objek penelitian ini memilih Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan peneliti memilih Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Junarwati, Basri, dkk (2013) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012. Hasil pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya, hasil lain menunjukkan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Investasi lokal, dan lainnya Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dari kabupaten/kota di provinsi Aceh. Berbeda dengan Junarwati dkk, penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen, akan tetapi juga menggunakan dana perimbangan sebagai variabel independen agar cakupan pendapatan daerah menjadi lebih luas.

Simanullang (2013) meneliti tentang pengaruh Belanja Modal, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 – 2012. Hasil penelitian adalah Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dibuktikan dari hasil Uji-F dan Uji-t menunjukkan berpengaruh sebesar 20,76% dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan terbukti sebesar 23,93%. Sedangkan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Berbeda dengan Simanullang, penelitian ini tidak menggunakan belanja modal karena peneliti hanya ingin meneliti bagian pendapatan daerah, sedangkan belanja modal masuk dalam bagian belanja daerah, sedangkan peneliti tidak menggunakan *Intergovernmental Revenue* karena akun tersebut merupakan dana hibah, dan

tidak semua daerah mendapatkan dana hibah sehingga peneliti tidak menggunakan *Intergovernmental Revenue* sebagai salah satu variabel independen.

Wenny (2012) meneliti tentang analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berbeda dengan Wenny, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen, akan tetapi juga menggunakan dana perimbangan sebagai variabel independen agar cakupan pendapatan daerah menjadi lebih luas.

Nugroho dan Rohman (2012) meneliti tentang pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *Intervening*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan efek positif langsung pada Belanja Modal terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *Intervening*. Berbeda dengan Nugroho dan Rohman, penelitian ini tidak menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variabel *Intervening*, akan tetapi menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen, dan penelitian

ini tidak menggunakan belanja modal karena peneliti hanya ingin meneliti bagian pendapatan daerah, sedangkan belanja modal masuk dalam bagian belanja daerah.

Alfred, Ubud, dkk (2012) meneliti tentang pengaruh Otonomi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah studi kasus pada pemerintah daerah Provinsi Papua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi bila dikelola mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi keuangan dan efektivitas keuangan daerah. Berbeda dengan Alfred dkk, penelitian ini tidak menggunakan otonomi fiskal karena otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga otonomi fiskal dapat diwakilkan dengan pendapatan asli daerah, sementara pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. sehingga semakin tingginya pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meninggikan penerimaan negara, dan semakin tinggi penerimaan negara maka akan semakin tinggi juga pemerintah memberikan dana terhadap pemerintah daerah yaitu berupa dana perimbangan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diwakilkan dengan dana perimbangan yang menjadi variabel independen peneliti.

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Mulia Andirfa, Hasan Basri, dan Shabri A. Majid (Jurnal Magister Akuntansi, ISSN 2302-0164 pp. 30-38 tahun 2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Variabel independen: Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
2	Budianto dan Stanly W Alexander (Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol.4 No.4 tahun 2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Utara	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Variabel independen: PAD dan Dana Perimbangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Dearah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli

				Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3	Junarwati, Hasan Basri dan Syukriy Abdullah (Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 6 No.2 tahun 2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012.	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya, hasil lain menunjukkan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Zakat, Hasil Investasi lokal, dan lainnya Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dari kabupaten/kota di provinsi Aceh.
4	Gideon Simanullang (UMRAH <i>Journal of Accounting</i> , Vol. 1 No.1 Hal.1-24 tahun 2013)	Pengaruh Belanja Modal, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah terhadap	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Daerah Variabel Independen: Belanja Modal,	Hasil penelitian adalah Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau. <i>Intergovernmental</i>

		Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 – 2012	<i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah	<i>Revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dibuktikan dari hasil Uji-F dan Uji-T menunjukkan berpengaruh sebesar 20,76% dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan terbukti sebesar 23,93%. Sedangkan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau
5	Cherrya Dhia Wenny (Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol. 2 No. 1 tahun 2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Variabel independen: PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6	Fajar Nugroho dan Abdul	Pengaruh Belanja Modal terhadap	Variabel dependen: Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal

	Rohman (Diponegoro <i>Journal of Accounting</i> , Vol. 1 No. 2 Hal. 1-14 tahun 2012)	pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel <i>Intervening</i>	Keuangan Daerah Variabel independen: Belanja Modal Variabel <i>intervening</i> : Pendapatan Asli Daerah	berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan efek positif langsung pada Belanja Modal terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel <i>Intervening</i> .
7	James Paul Alfred, Salim Ubud, M.S Idrus dan Djumahir ( <i>International Journal of Business and Management Invention</i> , ISSN 2319-8028 Vol.1 Issue 1 pp16-21 tahun 2012)	<i>Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua Province)</i>	Variabel dependen: <i>Local Financial Performance</i> Variabel independen: <i>Fiscal Autonomy</i> dan <i>Economic Growth</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi bila dikelola mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi keuangan dan efektivitas keuangan daerah. Sementara pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi daerah kinerja keuangan daerah.

### C. Kerangka Teoritik

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang akan meneliti pengaruh dari variabel independen yaitu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah naik secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan kajian konseptual dan hasil penelitian yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah yang didasari oleh teori rasio keuangan pemerintah daerah. Penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini, dikarenakan peneliti memperkirakan adanya hubungan antara variabel independen yaitu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dengan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini akan diteliti sejauh mana dan seperti apa pengaruh dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

### **1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana Perimbangan adalah salah satu unsur dari pendapatan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk membantu daerah untuk mendanai pembangunan dan juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain hal tersebut, Dana Perimbangan juga digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi karena lebih besarnya belanja daerah daripada pendapatan daerah.

Menurut Budianto dan Alexander (2016) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten/kota. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk

membayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun.

Lalu menurut Andirfa, Majid, dkk (2016) berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh karena semakin besar diterimanya Dana Perimbangan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin besar juga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan hal tersebut akan membuat menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hubungan antara Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga dijelaskan dalam Mahmudi (2010:87,142) yaitu penilaian kinerja keuangan secara lebih rinci dapat diukur dengan cara melakukan analisis laporan keuangan, salah satunya dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dengan perhitungannya yaitu Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dibagi Total Pendapatan Daerah. Semakin besar rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

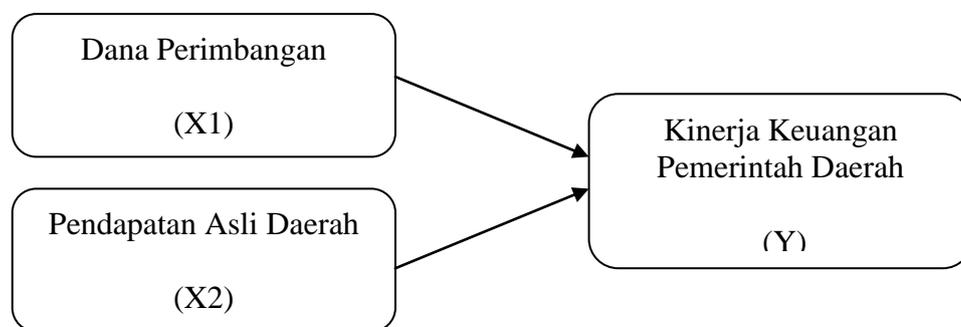
Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu unsur dari pendapatan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan keuangan diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Simanullang (2013) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Dibuktikan melalui hasil pengujian statistis dari Uji - F dan Uji-t menunjukkan berpengaruh sebesar 23,93%. Artinya, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Lalu menurut Budianto dan Alexander (2016) di dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah, semakin baik juga kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Penelitian ini mengacu pada pendapat Halim (2012:126,128) yaitu untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD dengan menggunakan Rasio Aktivitas yaitu Total Belanja Operasi dibagi dengan Total APBD. Rasio Aktivitas ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi atau belanja rutin. Semakin tinggi presentase dana yang dilalokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, sehingga pemerintah daerah kurang dapat mengelola pendapatan daerahnya, yaitu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah.

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2017)

#### **D. Perumusan Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian dan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka peneliti dapat menarik hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_1$  = diduga Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2015
2.  $H_2$  = diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2015.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritik yang telah dijelaskan, penelitian tentang pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian atau Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan pada Bulan Maret sampai dengan Juli 2017. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Ruang lingkup penelitian ini pada pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2011:7) dan dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda, karena variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan dengan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear (Hasan, 2011:269).

### **D. Populasi dan Sampling atau Jenis dan Sumber Data**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan yaitu sebanyak 27 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:85). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 19 Kabupaten dan Kota terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Kriteria atau pertimbangan tersebut yaitu:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada ditahun penelitian yaitu 2013 sampai dengan tahun 2015.
2. Didalam laporan tersebut terdapat total realisasi dana perimbangan, total realisasi pendapatan asli daerah, total realisasi belanja operasi dan total APBD.
3. Laporan tersebut telah dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data atau Operasionalisasi Variabel**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan mengamati data sekunder yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi terkait dan data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan.

##### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

a. Definisi Konseptual

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian atau prestasi dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah yang meliputi semua hak dan kewajiban yang berupa pendapatan dan belanja daerah agar tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kebebasan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat.

b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio aktivitas untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012:128). Rumus rasio aktivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \left( \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \right)$$

## 2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 2.1 Dana Perimbangan

### a. Definisi Konseptual

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik (Bratakusumah dan Solihin, 2004:174).

### b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nominal Dana Perimbangan yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Andirfa, Majid, dkk. 2016:33):

Dana Perimbangan =

$$\left[ \text{Dana Perimbangan} = \text{Ln Total Realisasi Dana Perimbangan} \right]$$

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah

### a. Definisi Konseptual

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2007:132).

## b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nominal Pendapatan Asli Daerah yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Andirfa, Majid, dkk. 2016:33) :

Pendapatan Asli Daerah =

$$\left( \begin{array}{l} \text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Ln Total Realisasi Pendapatan Asli} \\ \text{Daerah} \end{array} \right)$$

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang pasti dalam mengolah data adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda atau *Multiple Regression* dengan menggunakan software aplikasi IBM SPSS Statistics versi 24. Bentuk dari persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta, Besar nilai Y jika X=0

$\beta_1, \beta_2$  : Koefisien Regresi

$X_1$	: Dana Perimbangan
$X_2$	: Pendapatan Asli Daerah
$e$	: Error term

#### 1) Uji Asumsi Klasik

Untuk pengujian persamaan regresi berganda harus memenuhi persyaratan Uji Asumsi Klasik, yaitu dilakukannya pengambilan keputusan melalui uji t dan uji F tidak boleh bias atau samar-samar.

Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi berganda yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas.

##### (a) Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menggunakan uji normal histogram, uji normal *Probability Plot* dan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pada uji histogram grafik berada tepat ditengah. Pada uji *Probability Plot* terlihat bahwa pola penyebaran mengikuti garis diagonal. Untuk uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, akan di lihat dari nilai probabilitasnya, jika probabilitasnya  $> 0.05$  data terdistribusi normal.

(b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang tidak ada multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai besaran korelasi antar variabel bebas kurang dari 95%, VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari angka 10 dan mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1 atau 10%.

(c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan. Pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi perlu juga dikemukakan hipotesis dengan bentuk sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

$H_a$  : Terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Deteksi adanya problem autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Angka Durbin-Watson di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka Durbin-Watson di atas -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka Durbin-Watson di atas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Nilai tersebut dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

(d) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, dapat di lihat pada model grafik scatterplot. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka hal tersebut telah mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal tersebut telah mengindikasikan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

## 2) Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), uji kelayakan model berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk menguji kelayakan model regresi dapat dilakukan dengan melakukan Uji-F dan Uji  $R^2$ .

### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis di terima atau di tolak dengan membandingkan tingkat kesalahan 0.05.

### 2. Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien Determinasi dinotasikan dengan  $R^2$  yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Bila nilai Koefisien = 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara bila nilai Koefisien Determinasi = 1, artinya variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh  $R^2$  yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

### 3) Uji Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis dapat dilakukan dengan melakukan Uji-t.

- Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji-t)

Uji-*t* digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### 4) Analisis Koefisien Korelasi

Menurut Singgih Santoso (2010:141), Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mempelajari apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih, sedang analisis regresi memprediksi seberapa jauh pengaruh tersebut secara spesifik, tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan, dan jika terdapat hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Secara teoretis, dua variabel dapat sama sekali tidak berhubungan ( $r=0$ ), berhubungan secara sempurna ( $r=1$ ), atau antara kedua angka tersebut. Arah korelasi juga dapat positif (berhubungan searah) atau negatif (berhubungan berlawanan arah).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan. Sumber data dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu total realisasi dana perimbangan, total realisasi pendapatan asli daerah, total realisasi belanja operasi dan total APBD .

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Sampel Penelitian**

Keterangan	Jumlah
Jumlah Populasi Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat	27
Jumlah sampel Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang tidak ada ditahun penelitian 2013- 2015	(8)
Jumlah sampel Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang terdapat ditahun penelitian 2013- 2015	19
Jumlah tahun penelitian	3
Jumlah observasi keseluruhan (19 x 3)	57

Sumber : Data diolah peneliti (2017)

#### 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif diperoleh setelah melakukan regresi terhadap data penelitian yaitu sebanyak 57 sampel. Dengan hasil ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai penelitian seperti nilai minimum,

maksimum, mean dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
				Statistic	Std. Error	
DP (X1)	57	12.05	14.57	13.6426	.07166	.54101
PAD (X2)	57	9.89	13.14	11.2718	.11615	.87693
Kinerja Keuangan Pemda(Y)	57	.17	.43	.3389	.00851	.06422
Valid N (listwise)	57					

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

Tabel 4.2 memberikan penjabaran jumlah sampel seluruhnya yang berkontribusi dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 observasi, terhitung dari jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang terdapat pada periode 2013-2015.

Dari 57 sampel tersebut dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Menurut analisis peneliti, hasil dari uji deskriptif variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata yang menjadi observasi 57 sebesar 0,3389 atau 33,89%. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 33,89% dari total APBD dihabiskan untuk melakukan belanja operasi. Nilai tersebut cukup besar karena sepertiga bagian dari total APBD dihabiskan hanya untuk belanja operasi yaitu seperti gaji pegawai, belanja

barang, belanja bunga, belanja subsidi atau belanja-belanja lainnya yang bersifat rutin. Hal tersebut juga berarti pemerintah kurang mengalokasikan dananya untuk belanja modal yang bersifat investasi seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Hasil uji deskriptif variabel dependen kinerja keuangan dengan standar deviasi 0.064.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat berdasarkan nilai terbesar dimiliki oleh kabupaten Indramayu tahun 2013 sebesar 0.43 atau 43%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu menghabiskan sebesar 43% dari total APBD untuk melakukan belanja operasi. Sementara itu kinerja keuangan pemerintah daerah terendah dimiliki oleh Kota Bekasi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0.17 atau sebesar 17%, hal ini disebabkan karena kota Bekasi tidak terlalu besar dalam pengeluaran untuk belanja operasi dan lebih memaksimalkan dana pada anggaran belanja kepada belanja investasi untuk pembangunan infrastruktur.

## 2) Dana Perimbangan (X1)

Pada dana perimbangan (X1), nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar Rp954 miliar hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih banyak yang lebih bergantung pada dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri yang nilai rata-ratanya sebesar Rp116 miliar dan hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin menurun. Pada dana perimbangan standar deviasinya sebesar 0,54.

Perolehan dana perimbangan terendah sebesar Rp171 miliar oleh kabupaten Kuningan pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Kuningan pada tahun 2014 adalah kabupaten/kota yang paling tidak bergantung pada pemerintah pusat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat tetapi penerimaan dana perimbangan terendah pada kabupaten Kuningan tahun 2014 masih tetap lebih tinggi dari rata-rata penerimaan pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp116 miliar hal ini juga mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tetap tinggi meskipun penerimaan dana perimbangan yang diterima sudah paling kecil dari pada daerah kabupaten/kota yang lain.

Sedangkan jumlah dana perimbangan yang tertinggi adalah kota Bekasi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp2 triliun hal ini mengindikasikan kota Bekasi pada tahun 2013 adalah kabupaten/kota yang paling bergantung dalam pendapatan daerah pada dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerahnya.

### 3) Pendapatan Asli Daerah (X2)

Pada pendapatan asli daerah (X2), nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar Rp116 miliar hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih kurang bisa menghasilkan pendapatan daerahnya dengan pendapatan asli daerah karena masih dibawah dari rata-rata dana perimbangan yaitu sebesar Rp954 miliar sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat. Pada pendapatan asli daerah standar deviasinya sebesar 0,87.

Perolehan pendapatan asli daerah terendah sebesar Rp19 miliar oleh kota Banjar pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kota Banjar pada tahun 2015 adalah kabupaten/kota yang paling sedikit menghasilkan pendapatan asli daerahnya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, hal ini juga berarti kota Banjar sangat bergantung pada dana perimbangan pada pendapatan daerahnya. Sedangkan jumlah pendapatan asli daerah yang tertinggi adalah kabupaten Bandung pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp507 miliar hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Bandung pada tahun 2013 adalah kabupaten/kota yang paling besar menghasilkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat, akan tetapi pendapatan asli daerah terbesar tersebut masih tetap dibawah rata-rata penerimaan pendapatan daerah dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp954 miliar.

## **B. Pengujian Hipotesis**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

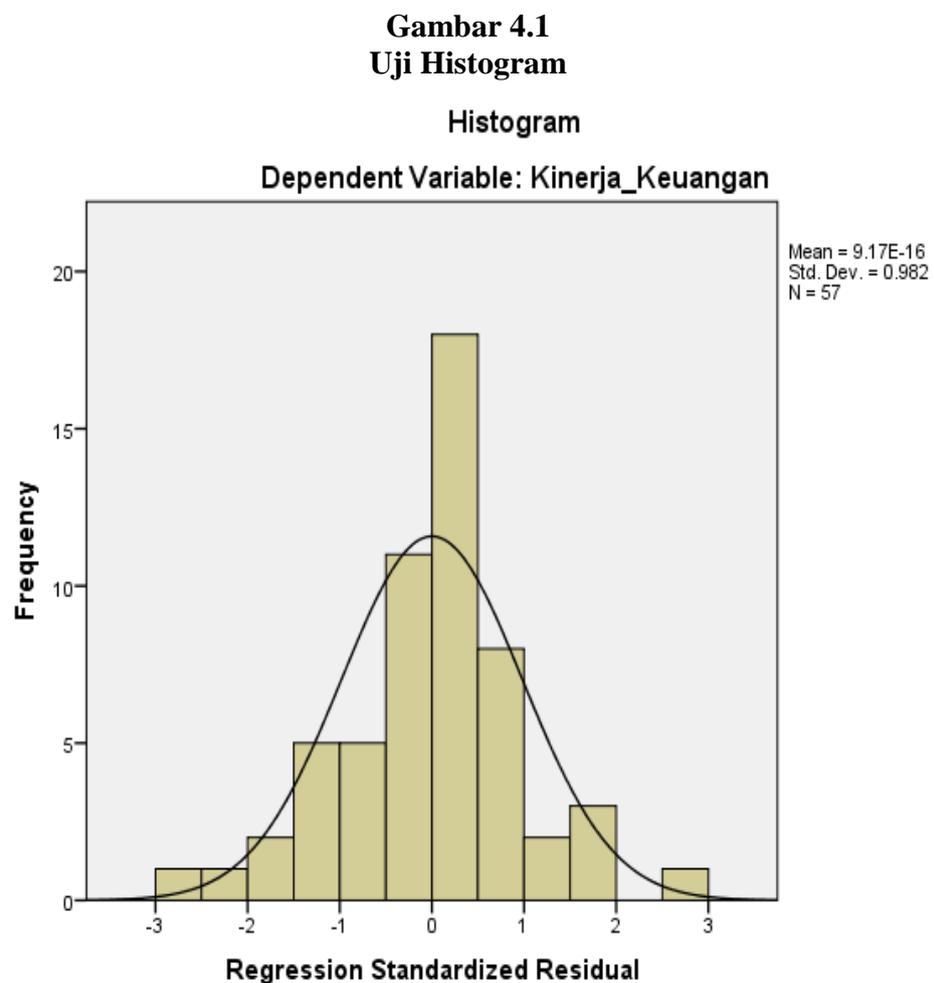
#### **a) Uji Normalitas**

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menggunakan uji normal histogram, uji normal *Probability Plot* dan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pada uji histogram grafik berada tepat ditengah.

Pada uji *Probability Plot* terlihat bahwa pola penyebaran mengikuti garis diagonal. Untuk uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, akan di lihat dari nilai probabilitasnya, jika probabilitasnya  $> 0.05$  data terdistribusi normal.

### 1) Uji Histogram

Model regresi penelitian ini terlihat terdistribusi normal pada gambar 4.1. Terlihat bahwa grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal atau tepat ditengah.

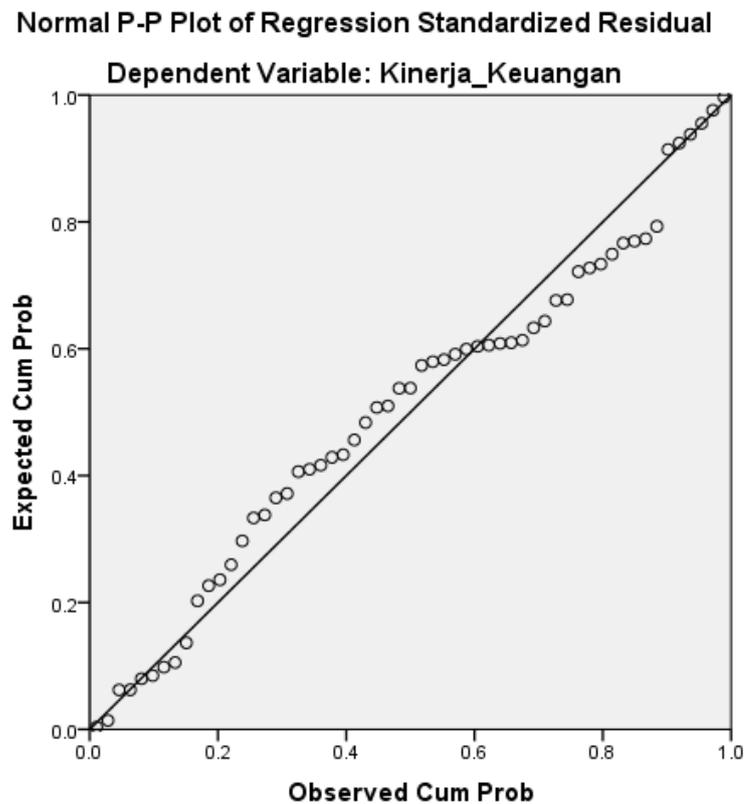


Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

## 2) Uji Normal *Probability Plot*

Pada gambar 4.2 berikut ini, dapat terlihat bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pola penyebaran data mengikuti garis diagonal. Garis yang menggambarkan data penelitian ini mengikuti arah garis diagonal.

**Gambar 4.2**  
**Uji *Probability Plot***



Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

## 3) Uji Kolmogorov-Smirnov

Selain analisis dengan grafik, peneliti menggunakan analisis statistik untuk menguji normalitas. Hal tersebut dikarenakan seringkali data yang

secara visual kelihatan normal, ternyata memiliki hasil yang berbeda dengan uji statistik, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov.

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.3 dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov *didapatkan* bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.1 dengan nilai Asymp. Sig. (2tailed) sebesar 0.2.

Hal ini menunjukkan bahwa data yang ada terdistribusi dengan normal karena 0.2 lebih besar dari 0.05. Pada pengujian ini data terbukti terdistribusi secara normal. Berikut ini hasil pengujian dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov.

**Tabel 4.3**  
**Uji Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04565307
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.089
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang tidak ada multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai besaran korelasi antar variabel bebas kurang dari 95%, VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari angka 10 dan mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1 atau 10%.

Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai VIF dari 2 variabel independen kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Berikut ini hasil tampilan dari hasil uji multikolinearitas.

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.741	.157		4.725	.000		
DP (X1)	-.074	.013	-.624	-5.673	.000	.772	1.295
PAD (X2)	.054	.008	.738	6.702	.000	.772	1.295

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda

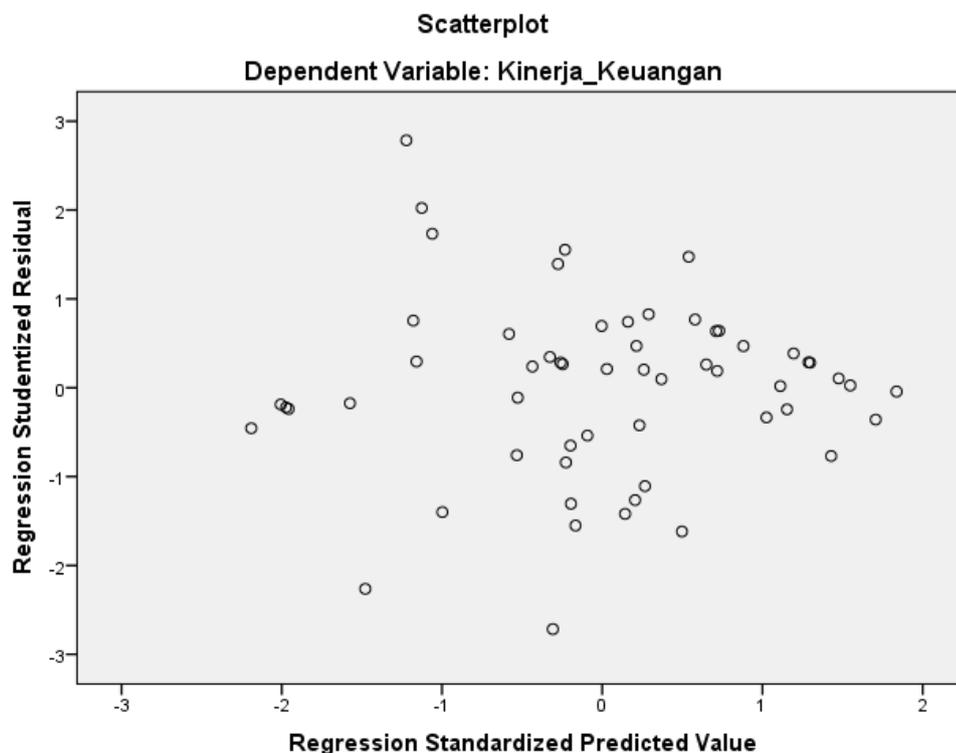
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, dapat di lihat pada model grafik *scatterplot*. Pengamatan melalui *scatterplot* dilakukan dengan menginput nilai variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID) saat melakukan regresi

Pada gambar 4.3 dapat terlihat bahwa grafik *scatterplot* memiliki pola yang tidak jelas dan menyebar secara acak. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian bebas dari heteroskedastisitas.

**Gambar 4.3**  
**Grafik Scatterplot**



Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan. Pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Deteksi adanya problem autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Angka Durbin-Watson di bawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka Durbin-Watson di atas  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka Durbin-Watson di atas  $+2$  berarti ada autokorelasi negative.

Nilai tersebut dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. Berikut adalah tabel 4.5 hasil dari uji Durbin-Watson :

**Tabel 4.5**  
**Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.703 <sup>a</sup>	.495	.476	.04649	.870

a. Predictors: (Constant), DP (X1), PAD (X2)

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

Berdasarkan tabel IV.5, angka Durbin-Watson berada pada 0.870 yang berarti menunjukkan tidak adanya autokorelasi sesuai deteksi nomer 2 yaitu angka Durbin-Watson di atas -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

## 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan metode regresi linear berganda, demikian hasil regresi berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.741	.157		4.725	.000		
DP (X1)	-.074	.013	-.624	-5.673	.000	.772	1.295
PAD (X2)	.054	.008	.738	6.702	.000	.772	1.295

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

Berdasarkan hasil analisis regresi yang didapatkan dalam tabel IV.6, dapat dituliskan model regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,741 - 0,074DP + 0.054PAD + e$$

Penjelasan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

DP = Dana Perimbangan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

e = *Error*

Dari persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 0,741 atau 74,1% artinya dana perimbangan dan pendapatan asli daerah tetap bernilai (konstan), maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan bertambah sebesar 0,741 atau 74,1%.
- 2) Nilai koefisien variabel dana perimbangan sebesar -0.074 atau -7,4% mempunyai arti jika variabel independen lainnya bernilai konstan dan variabel dana perimbangan kenaikan 1% maka kinerja keuangan daerah akan berkurang sebesar -0,074 atau -7,4%. Koefisien bertanda negatif menunjukkan terjadi hubungan negatif yaitu jika dana perimbangan bertambah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkurang
- 3) Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,054 atau 5,4% artinya jika variabel independen lainnya bernilai konstan pendapatan asli daerah meningkat 1% maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan bertambah sebesar 0,054 atau 5,4%. Koefisien bertanda positif menunjukkan terjadi hubungan positif yaitu jika pendapatan asli daerah bertambah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan bertambah.

## 6. Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji-t)

Uji- $t$  digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengukuran yang dipakai adalah dengan menggunakan perbandingan  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$ . Untuk itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

$H_a$  : Variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.

Jika  $t_{tabel} > t_{hitung}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak atau jika  $t_{tabel} < t_{hitung}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan derajat kepercayaan 0,05 atau 5% dan  $t_{tabel}$  dengan 57 dan 3 variabel sebesar 2,00488. Berikut adalah tabel hasil dari Uji-t :

**Tabel 4.7**  
Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.741	.157		4.725	.000		
DP (X1)	-.074	.013	-.624	-5.673	.000	.772	1.295
PAD (X2)	.054	.008	.738	6.702	.000	.772	1.295

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan ( $H_1$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil uji t yang ada pada tabel 4.7, variabel dana perimbangan memiliki  $t_{hitung} = -5,673$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{tabel} < t_{hitung}$  ( $2,002 < 5,673$ ). Nilai negatif pada  $t_{hitung}$  tidak berarti matematis, nilai tersebut hanya menunjukkan arah pengaruh variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menuju ke arah negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan variabel dana perimbangan secara parsial mempengaruhi variabel terikat, dengan nilai signifikansi variabel  $0,000 < 0,05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan ( $H_1$ ) diterima dan dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu negatif signifikan.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan ( $H_2$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2015.

Berdasarkan hasil Uji-t yang disajikan dalam tabel 4.7, pendapatan asli daerah memiliki  $t_{hitung} = 6,702$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{tabel} < t_{hitung}$  ( $2,002 < 6,702$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan variabel pendapatan asli daerah secara parsial mempengaruhi variabel terikat, dengan nilai signifikansi variabel  $0,000 < 0,05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan ( $H_2$ ) diterima dan dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu positif signifikan.

#### **7. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)**

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat kesalahan 0.05.

Hipotesis akan diterima apabila  $F_{tabel} > F_{hitung}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak atau apabila  $F_{tabel} < F_{hitung}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 maka  $F_{tabel}$  sebesar 3,17. Berikut hasil Uji-F pada tabel 4.8 :

**Tabel 4.8**  
**Uji-F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.114	2	.057	26.423	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.117	54	.002		
	Total	.231	56			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda

b. Predictors: (Constant), DP (X1), PAD (X2)

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

Berdasarkan table 4.8 diatas, maka disimpulkan dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 semua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu signifikan positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai Ftabel < Fhitung ( $3,17 < 26,423$ ) dan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu positif signifikan.

## 8. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi. Bila nilai Koefisien Determinasi = 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya. Sementara bila nilai Koefisien Determinasi = 1, artinya variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya.

Berikut ini adalah tabel hasil output dari uji koefisien determinasi :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.703 <sup>a</sup>	.495	.476	.04649	.870

a. Predictors: (Constant), DP (X1), PAD (X2)

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemda

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

Dari tabel diatas dapat terlihat *Adjusted R*<sup>2</sup> dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebesar 0,476 atau 47%. Hal ini mengindikasikan bahwa 47% dari kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan 53% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada model regresi yang diajukan oleh peneliti. Melihat hasil penelitian jurnal pendukung dapat diketahui variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya belanja modal, pertumbuhan ekonomi, *intergovernmental revenue*, dan lain sebagainya.

## 9. Analisis Koefisien Korelasi

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat nilai koefisien korelasi adalah plus (+) atau minus (-). Hal ini menunjukkan ini arah korelasi.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Koefisien Korelasi**

		DP (X1)	PAD (X2)	Kinerja Keuangan Pemda
DP (X1)	Pearson Correlation	1	.477**	-.272*
	Sig. (2-tailed)		.000	.040
	N	57	57	57
PAD (X2)	Pearson Correlation	.477**	1	.440**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001
	N	57	57	57
Kinerja Keuangan Pemda	Pearson Correlation	-.272*	.440**	1
	Sig. (2-tailed)	.040	.001	
	N	57	57	57

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : SPSS 24, data diolah oleh peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil koefisien korelasi, diketahui antara Dana Perimbangan (X1) dengan Pendapatan Asli Daerah (X2) nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti terdapat korelasi signifikan. Selanjutnya, antara Dana Perimbangan (X1) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) nilai signifikansi  $0,04 < 0,05$  yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Terakhir, antara Pendapatan Asli Daerah (X2) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  yang berarti terdapat korelasi yang signifikan.

Berdasarkan tanda bintang SPSS, diketahui bahwa nilai Pearson Correlation yang dihubungkan antara masing-masing variabel mempunyai tanda bintang, berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dana Perimbangan terdapat di APBD yg merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Daerah seperti terlihat pada Gambar 2.1 halaman 25. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari hasil Uji-t yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi  $X_1$  yang dibawah standar yaitu 0,05. Hasil  $t_{hitung}$  diperoleh jumlah 5,673, sedangkan dalam  $t_{tabel}$  2,002, berdasarkan besaran  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka bisa dipastikan memang dana perimbangan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya,

yang mengatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada hasil penelitian ini, besarnya dana perimbangan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini disebabkan masih belum maksimalnya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memanfaatkan potensi pendapatan asli daerahnya.

Seperti di Kabupaten Bogor yang belum memanfaatkan potensi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Meskipun pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Bogor terus meningkat. Bahkan jumlahnya tercatat sebagai yang terbesar kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi. Namun, pendapatan tersebut belum maksimal direalisasikan pemerintah daerah setempat.

Sesuai yang dikatakan Bupati Bogor yang dikutip dari harian *pikiran-rakyat.com*. Bupati Bogor menyebut target PKB 2013 sebesar Rp93.949.477.000 tahun ini mencapai Rp141.807.300.000 atau naik sekitar 51 persen. Walaupun selalu terealisasi 100 persen. Penerimaan PKB Kabupaten Bogor itu baru 70 persen dari potensi yang ada. Bupati Bogor meminta instansi terkait bekerja lebih keras lagi meningkatkan pendapatan PKB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan dengan penelitian sebelumnya yaitu menurut Budianto dan Alexander (2016) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap

Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten/kota. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun.

Lalu menurut Andirfa, Majid, dkk (2016) berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh karena semakin besar diterimanya Dana Perimbangan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin besar juga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan hal tersebut akan membuat menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan keuangan diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang

diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD juga terdapat di APBD pada bagian Pendapatan Daerah seperti terlihat pada Gambar 2.1 halaman 25

Dari hasil Uji-t yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi  $X_2$  yang dibawah standar yaitu 0,05. Hasil  $t_{hitung}$  diperoleh jumlah 6,702, sedangkan dalam  $t_{tabel}$  2,002, berdasarkan besaran  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka bisa dipastikan memang pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada hasil penelitian ini, masih kecilnya pendapatan asli daerah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat masih bergantung terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Komposisi Pendapatan Daerah pada gambaran umum APBD tahun 2016 besaran jumlah uang dan presentase, terlihat bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 64% atau senilai Rp628,3 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 23% atau senilai Rp229,3 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 13% atau senilai Rp129,8 triliun.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan dengan penelitian sebelumnya yaitu menurut Simanullang (2013) dan Budianto dan Alexander (2016) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah, semakin baik juga kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

### **3. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memiliki beberapa keterbatasan, dan saran yang peneliti sarankan adalah sebagai berikut:

1. Sampel penelitian terbatas pada 19 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, dan dalam periode 3 tahun (2013-2015). Sehingga hasil penelitian ini belum mewakili dan menggambarkan keadaan kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
2. Peneliti hanya menggunakan rasio aktivitas dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan pengukuran lain seperti rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efisien dan rasio efektivitas.
3. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yaitu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan menguji apakah terdapat pengaruh antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Periode penelitian diambil selama 3 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan sampel seluruh laporan keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang ada di tahun penelitian dan telah dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun.
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin kecil juga dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima, maka pemerintah daerah akan

semakin mandiri dalam mengelola keuangannya jika pendapatan asli daerahnya lebih besar dari pada dana perimbangan yang diterima, dan kebergantungan kepada pemerintah pusat juga akan semakin berkurang, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menaik.

## **B. Implikasi**

Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi dari dana perimbangan dalam kehidupan yaitu dana perimbangan yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya, akan tetapi jika pemerintah daerah hanya bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat hal tersebut memnunjukkan bahwa pemeirntah daerah tersebut tidak mandiri dalam mengelola keuangannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Maka semakin besar dana perimbangan yang diterima, semakin menurun juga kinerja keunangan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah adalah salah satu cara untuk daerah tersebut agar tidak terus menerus bergantung kepada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus bisa lebih

efektif dan efisien lagi dalam memanfaatkan kekayaan daerah agar dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sehingga daerah tersebut akan mandiri dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat. Maka semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, kinerja keuangan pemerintah daerah pun juga akan meningkat.

### C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya:
  - a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun atau mengambil tahun yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga hasil yang didapat agar lebih maksimal.
  - b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan populasi menjadi seluruh Provinsi di Indonesia agar mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh dan baik.
  - c. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diganti dengan menggunakan pengukuran rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efisien dan rasio efektivitas.
  - d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain dalam penelitian ini yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti belanja modal, pertumbuhan ekonomi, *intergovernmental revenue*, dan lain sebagainya.

## 2. Bagi pemerintah

Peneliti mengharapkan pemerintah pusat cepat tanggap dalam merealisasikan sesuai dengan kebutuhan secara proporsional untuk dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Selain itu, untuk pemerintah daerah agar dapat menggali dan memanfaatkan potensi-potensi daerahnya yang ada agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga daerah tersebut lama kelamaan akan mengurangi ketergantungannya terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal ini sebagai wujud dari kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerah kebutuhan daerah tu sendiri. Sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri lagi dalam membangun daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Alfred, James Paul. Salim Ubud, dkk. *Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua Province)*. *International Journal of Business and Management Invention*. Desember 2012, ISSN 2319-8028, Vol. 1 Issue 1, hal. 16-21.
- Andirfa, Mulia. Shabri A. Majid, dkk. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh*. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 2016, ISSN 2302-0164, hal. 30-38.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Budianto dan Stanly W Alexander. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*. Desember 2016, Vol.4 No.4, hal. 844-851.
- Colfer, Carol J. P., Ganga Ram Dahal, dan Doris Capistrano. *Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan: Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik*. Bogor: CIFOR, 2008.
- Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok materi statistika 1 (Statistik Deskriptif)*. Edisi Kedua. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011.
- <http://bandung.bisnis.com/read/20150605/82444/535082/ini-6-masalah-yang-masih-membelit-laporan-keuangan-daerah-di-jabar> (diakses 27 Juni 2017)
- <http://news.liputan6.com/read/2876819/penyerapan-anggaran-jawa-barat-lambat> (diakses 27 Juni 2017)
- [http://www.djpk.depkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316) (diakses 27 Juni 2017)

<http://www.jabarprov.go.id/assets/images/menu/ikhtisar%20APBD%20TA.%202017.JPG> (diakses 27 Juni 2017)

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/10/terbesar-kedua-di-jabar-pendapatan-pajak-kendaraan-kabupaten-bogor-baru-belum>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/04/nnu386-bpkpengelolaan-keuangan-daerah-masih-jadi-masalah> (diakses 5 Maret 2017)

Junarwati, Hasan Basri, dkk. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Juli 2013, Vol. 6 No. 2, hal. 186-193.

Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010.

Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI, 2007.

Nachrowi, Nachrowi Djalal, dan Hardius Usman. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. "Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Oktober 2016, Vol. 3(2), hal. 89-104.

Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *Intervening*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 2012, Vol. 1 No. 2, hal. 1-14.

Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rachim, Abd. Barometer Keuangan Negara. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI, 2015

Santoso, Singgih. Statistik Multivariat, Jakarta : PT Gramedia, 2010.

Simanullang, Gideon. Pengaruh Belanja Modal, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 – 2012. *UMRAH Journal Of Accounting*. 2013, Vol. 1 No. 1, hal. 1-24.

Sugianto. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grasindo, 2007.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suparmoko, M. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi pertama. Yogyakarta : ANDI, 2002.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wenny, Cherrya Dhia. Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*. September 2012, Vol. 2 No.1, hal. 39-51.

**LAMPIRAN****Lampiran 1 : Daftar Populasi nama Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa****Barat**

<b>No</b>	<b>Nama Kabupaten / Kota</b>
1	Kab. Bandung
2	Kab. Bekasi
3	Kab. Bogor
4	Kab. Ciamis
5	Kab. Cianjur
6	Kab. Cirebon
7	Kab. Garut
8	Kab. Indramayu
9	Kab. Karawang
10	Kab. Kuningan
11	Kab. Majalengka
12	Kab. Purwakarta
13	Kab. Subang
14	Kab. Sukabumi
15	Kab. Sumedang
16	Kab. Tasikmalaya
17	Kota Bandung
18	Kota Bekasi
19	Kota Bogor

20	Kota Cirebon
21	Kota Depok
22	Kota Sukabumi
23	Kota Tasikmalaya
24	Kota Cimahi
25	Kota Banjar
26	Kab. Bandung Barat
27	Kab. Pangandaran

**Lampiran 2 : Daftar sampel nama Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat**

No.	Nama Kabupaten / Kota
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bekasi
3	Kabupaten Cianjur
4	Kabupaten Garut
5	Kabupaten Indramayu
6	Kabupaten Karawang
7	Kabupaten Kuningan
8	Kabupaten Purwakarta
9	Kabupaten Subang
10	Kabupaten Sumedang
11	Kabupaten Tasikmalaya
12	Kabupaten Bandung Barat
13	Kota Bandung
14	Kota Bekasi
15	Kota Bogor
16	Kota Sukabumi
17	Kota Tasikmalaya
18	Kota Cimahi
19	Kota Banjar

**Lampiran 3 : Data Ln Total Realisasi Dana Perimbangan tahun 2013-2015**

No	Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan		
		2013	2014	2015
1	Kabupaten Bandung	14.56	13.89	13.75
2	Kabupaten Bekasi	14.57	13.63	13.80
3	Kabupaten Cianjur	14.24	14.26	13.56
4	Kabupaten Garut	14.46	13.29	13.53
5	Kabupaten Indramayu	14.18	12.53	13.54
6	Kabupaten Karawang	14.24	12.29	13.50
7	Kabupaten Kuningan	13.95	12.37	13.53
8	Kabupaten Purwakarta	13.71	12.05	13.59
9	Kabupaten Subang	14.09	12.75	13.58
10	Kabupaten Sumedang	14.01	13.17	13.60
11	Kabupaten Tasikmalaya	14.16	13.07	13.69
12	Kabupaten Bandung Barat	13.86	13.25	13.74
13	Kota Bandung	14.39	13.19	13.79
14	Kota Bekasi	14.49	13.25	13.85
15	Kota Bogor	13.58	13.07	13.93
16	Kota Sukabumi	13.20	13.66	13.96
17	Kota Tasikmalaya	13.54	13.65	13.94
18	Kota Cimahi	13.25	13.69	13.93
19	Kota Banjar	13.89	13.65	13.97

**Lampiran 4 : Data Ln Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2015**

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah		
		2013	2014	2015
1	Kabupaten Bandung	13.14	11.06	11.28
2	Kabupaten Bekasi	12.96	11.15	11.23
3	Kabupaten Cianjur	13.09	11.03	11.33
4	Kabupaten Garut	12.39	10.83	11.34
5	Kabupaten Indramayu	12.46	10.71	11.25
6	Kabupaten Karawang	12.40	10.72	11.27
7	Kabupaten Kuningan	12.43	10.32	11.04
8	Kabupaten Purwakarta	12.44	10.59	11.01
9	Kabupaten Subang	12.37	11.48	11.02
10	Kabupaten Sumedang	12.37	10.62	11.05
11	Kabupaten Tasikmalaya	12.16	10.95	11.13
12	Kabupaten Bandung Barat	12.17	10.42	10.96
13	Kota Bandung	12.08	10.46	10.64
14	Kota Bekasi	12.07	10.00	10.32
15	Kota Bogor	12.15	10.31	10.35
16	Kota Sukabumi	12.20	10.26	10.03
17	Kota Tasikmalaya	12.06	10.45	10.03
18	Kota Cimahi	12.16	10.34	10.03
19	Kota Banjar	11.17	11.32	9.89

**Lampiran 5 : Data Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2015**

No	Kabupaten/Kota	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		
		2013	2014	2015
1	Kabupaten Bandung	0.40	0.40	0.26
2	Kabupaten Bekasi	0.29	0.30	0.20
3	Kabupaten Cianjur	0.41	0.39	0.29
4	Kabupaten Garut	0.37	0.41	0.30
5	Kabupaten Indramayu	0.43	0.41	0.28
6	Kabupaten Karawang	0.36	0.37	0.33
7	Kabupaten Kuningan	0.40	0.41	0.31
8	Kabupaten Purwakarta	0.41	0.38	0.29
9	Kabupaten Subang	0.40	0.37	0.30
10	Kabupaten Sumedang	0.40	0.38	0.27
11	Kabupaten Tasikmalaya	0.37	0.36	0.34
12	Kabupaten Bandung Barat	0.38	0.39	0.28
13	Kota Bandung	0.34	0.34	0.23
14	Kota Bekasi	0.33	0.34	0.17
15	Kota Bogor	0.38	0.32	0.26
16	Kota Sukabumi	0.42	0.41	0.24
17	Kota Tasikmalaya	0.39	0.37	0.24
18	Kota Cimahi	0.40	0.38	0.24
19	Kota Banjar	0.31	0.35	0.22

**Lampiran 6 : Data Realisasi Dana Perimbangan tahun 2013-2015 (dalam jutaan Rupiah)**

Kabupaten / Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
Kab. Bandung	2,104,761	831,963	934,509
Kab. Bekasi	2,135,358	1,556,108	987,066
Kab. Cianjur	1,522,548	589,594	778,141
Kab. Garut	1,897,531	275,601	754,981
Kab. Indramayu	1,442,566	217,150	758,667
Kab. Karawang	1,528,879	235,220	727,636
Kab. Kuningan	1,139,711	171,156	749,429
Kab. Purwakarta	898,515	345,215	796,801
Kab. Subang	1,313,261	526,993	792,313
Kab. Sumedang	1,210,498	473,942	802,358
Kab. Tasikmalaya	1,415,317	569,036	883,950
Kab. Bandung Barat	1,043,185	536,211	925,865
Kota Bandung	1,778,972	570,016	975,831
Kota Bekasi	1,967,531	475,650	1,032,517
Kota Bogor	792,975	855,646	1,124,953
Kota Sukabumi	539,661	850,491	1,153,878
Kota Tasikmalaya	756,558	878,802	1,138,187
Kota Cimahi	570,894	845,410	1,120,232
Kota Banjar	1,073,185	854,289	1,166,013

**Lampiran 7 : Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2015  
(dalam jutaan Rupiah)**

Kabupaten / Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
Kab. Bandung	507,244	63,845	79,216
Kab. Bekasi	425,625	69,388	75,036
Kab. Cianjur	482,101	61,539	83,027
Kab. Garut	240,632	50,762	84,201
Kab. Indramayu	257,713	45,016	76,871
Kab. Karawang	242,341	45,158	78,605
Kab. Kuningan	250,517	30,218	62,170
Kab. Purwakarta	253,764	39,833	60,573
Kab. Subang	235,314	96,615	61,386
Kab. Sumedang	234,612	40,801	62,869
Kab. Tasikmalaya	190,474	56,855	68,487
Kab. Bandung Barat	193,870	33,597	57,621
Kota Bandung	176,445	35,057	41,694
Kota Bekasi	175,241	22,066	30,346
Kota Bogor	189,696	30,036	31,127
Kota Sukabumi	199,539	28,467	22,645
Kota Tasikmalaya	172,883	34,551	22,779
Kota Cimahi	191,599	30,949	22,807
Kota Banjar	70,625	82,593	19,829

**Lampiran 8 : Data Realisasi Belanja Operasi tahun 2013-2015 (dalam jutaan Rupiah)**

Kabupaten / Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
Kab. Bandung	2,711,472	3,270,799	2,570,063
Kab. Bekasi	2,110,302	2,462,346	1,871,861
Kab. Cianjur	1,839,744	2,113,754	1,864,824
Kab. Garut	2,240,039	2,547,804	2,149,039
Kab. Indramayu	1,877,366	2,164,971	1,652,412
Kab. Karawang	2,147,147	2,513,293	1,922,598
Kab. Kuningan	1,316,275	1,539,281	1,514,244
Kab. Purwakarta	1,122,623	1,181,092	1,036,155
Kab. Subang	1,482,967	1,682,119	1,477,243
Kab. Sumedang	1,387,366	1,605,949	1,296,754
Kab. Tasikmalaya	1,663,036	1,844,757	1,980,115
Kab. Bandung Barat	1,354,003	1,529,810	1,230,879
Kota Bandung	2,961,972	3,464,084	2,625,954
Kota Bekasi	2,069,936	2,385,597	1,465,301
Kota Bogor	1,193,377	1,200,241	1,038,002
Kota Sukabumi	721,782	800,117	545,561
Kota Tasikmalaya	1,049,647	1,172,407	814,527
Kota Cimahi	801,241	890,127	605,131
Kota Banjar	424,980	490,010	338,794

**Lampiran 9 : Data Realisasi Total APBD tahun 2013-2015 (dalam jutaan Rupiah)**

Kabupaten / Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
Kab. Bandung	6,820,307	8,180,473	9,740,578
Kab. Bekasi	7,181,161	8,231,207	9,514,250
Kab. Cianjur	4,517,574	5,371,459	6,348,506
Kab. Garut	5,981,689	6,271,353	7,190,690
Kab. Indramayu	4,339,472	5,260,635	5,907,407
Kab. Karawang	5,906,098	6,723,345	5,811,348
Kab. Kuningan	3,270,057	3,715,792	4,869,773
Kab. Purwakarta	2,755,956	3,113,003	3,619,462
Kab. Subang	3,719,074	4,554,071	4,908,934
Kab. Sumedang	3,449,137	4,197,873	4,861,802
Kab. Tasikmalaya	4,470,451	5,122,729	5,791,504
Kab. Bandung Barat	3,518,719	3,937,618	4,421,641
Kota Bandung	8,765,095	10,084,187	11,398,017
Kota Bekasi	6,330,021	6,962,630	8,550,709
Kota Bogor	3,137,656	3,705,778	4,065,541
Kota Sukabumi	1,717,394	1,952,946	2,235,612
Kota Tasikmalaya	2,725,177	3,151,554	3,347,712
Kota Cimahi	1,999,219	2,312,105	2,488,462
Kota Banjar	1,375,542	1,395,662	1,575,053

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Ikhtiar Adi Luhung**, lahir di Jakarta, 27 Mei 1995.

Anak kedua dari dua bersaudara. Merupakan anak laki-laki dari pasangan Suropto dan Wasiatun dan memiliki satu kakak laki-laki. Bertempat tinggal di Jl.Raya Kelapa Dua, Gang Birah No.66, RT 001 RW 08, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta barat.

Menempuh pendidikan formal di SDN 01 Pagi Kelapa Dua dan lulus pada tahun 2007. Pendidikan dilanjutkan ke jenjang menengah di SMPN 75 Jakarta dan lulus pada tahun 2010. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMAN 112 Jakarta dan lulus pada tahun 2013.

Penulis merupakan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2013. Pada Juli 2017, Penulis menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015”. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dilaksanakan di Malaysia pada 2015, serta Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Lama pada periode Juli - September 2016.